

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Fabiana Ririn Dadut
ririndadut@gmail.com
Endang Dwi Retnani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effectiveness of the system information implementation of the Local financial management system (SIPKD), local financial accounting system, and local government's performance on the quality of local financial statements. Furthermore, the research method of this research was used quantitatively. Meanwhile, the data analysis technique used Partial Least Square (PLS). The research data used primary data. Moreover, the data sources through the result of a questionnaire by the respondents. The respondents of this research used employees' financials at OPD city of Surabaya with the number of samples was 100 respondents. Based on the research result concluded that (1) The effectiveness of the information system implementation of local financial management (SIPKD) did not have any effect on the quality of the local financial report, it was seen from the lack of the SIPKD application operation, the availability of appropriate tools and network. Therefore, it did not fulfil previous criteria. (2) System of local financial accounting had a positive effect on the quality of local financial statements. It was seen from the implementation of the financial accounting system managed by OPD city of Surabaya, systematically arranged from data collection to financial reporting by applicable accounting standards. (3) The performance of local government did not have any effect on the quality of local financial statements, it can be seen from the stipulation of regulations that were not clear and lack of mastery in the field of accounting which caused the performance of local governments to be not optimal in realizing quality financial reports.

Keywords: system of local financial management information system (SIPKD), system of local financial accounting, performance of local government, quality of local financial statement

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan *Partial Least Square* (PLS). Data yang digunakan adalah data primer. Sumber data yaitu melalui hasil pengisian kuesioner oleh responden. Responden dalam penelitian ini adalah kepala bagian keuangan dan staf/pegawai keuangan di OPD kota Surabaya dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa (1) Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, dilihat dari masih terdapat kekurangan dalam mengoperasikan aplikasi SIPKD, ketersediaan peralatan dan jaringan yang belum memadai. Sehingga belum memenuhi asas yang ditentukan. (2) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, dilihat dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang dikelola OPD kota Surabaya tersusun secara sistematis mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. (3) Kinerja Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, dilihat dari penetapan peraturan yang belum jelas dan kurang menguasai bidang akuntansi yang menyebabkan kinerja pemerintah daerah belum optimal dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kunci Kunci: sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, kinerja pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan daerah

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berbangsa yang semakin meluas dan terbuka, pemerintah sebagai penentu dan perancang segala hasil pelaksanaan pembangunan harus menyediakan laporan keuangan yang berkualitas untuk digunakan oleh masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, wujud nyata untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan dalam kerangka konseptual bahwa laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai status keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan Keuangan Daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah (Adhi dan Suhardjo, 2013). Terdapat empat opini yang dapat diberikan oleh BPK antara lain Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW) dan Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Dari empat opini yang diberikan oleh BPK, laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan mendapat penilaian WTP yang artinya laporan keuangan tersebut disajikan dengan wajar dan berkualitas.

Pengelolaan keuangan daerah kota Surabaya yang terus mengalami peningkatan, dapat dilihat dari prestasi yang diperoleh pemerintah kota Surabaya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tingkat provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun anggaran 2018. Penghargaan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tingkat Provinsi Jawa Timur yang diperoleh pemerintah kota Surabaya sudah kali ke-8 sejak tahun anggaran 2011. Berikut hasil opini pemeriksaan BPK terhadap LKPD kota Surabaya pada lima tahun terakhir dihitung dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Pada tahun 2014 kota Surabaya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP), tahun 2015-2018 juga mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (www.bpk.go.id).

Berdasarkan fenomena dari perkembangan positif hasil pemeriksaan atas LKPD kota Surabaya tahun 2014 hingga tahun 2018 tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung pemerintah daerah kota Surabaya meraih opini WTP. Faktor-faktor tersebut yang diduga yaitu Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kinerja Pemerintah Daerah. Salah satu faktor tersebut yang diduga mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). SIPKD merupakan aplikasi komprehensif yang berfungsi sebagai sarana bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas penerapan berbagai peraturan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomi, efektivitas, transparansi, akuntabel dan auditabel. Pemerintah berusaha untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat melalui konstruksi teknologi informasi di bidang keuangan daerah, dengan harapan pemerintah dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Dewi dan Mimba, 2014).

Selanjutnya faktor yang juga diduga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai

informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas-entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat berguna untuk mengelola dana secara transparan, ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel (Halim, 2007:42). Menurut teori dari Mardiasmo (2004) yang menyatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang andal.

Faktor terakhir yang diduga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah adalah kinerja pemerintah daerah. Kinerja dari pemerintah daerah merupakan cerminan kualitas proses atau keberhasilan kegiatan/program yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk hasil berupa peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan merupakan salah satu wujud dari keberhasilan sebuah lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja, seperti lingkungan kerja, kelengkapan kerja, budaya kerja, motivasi, kemampuan pegawai, struktur organisasi, kepemimpinan agar bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan yang sudah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah: (1) Apakah efektivitas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?, (2) Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?, (3) Apakah kinerja pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menguji secara empiris pengaruh efektivitas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan daerah, (2) Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah, (3) Untuk menguji secara empiris pengaruh kinerja pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori ini digunakan untuk menjelaskan adanya hubungan antara rakyat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Pemerintah sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik (Jensen dan Meckling, 1976).

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut disusun dengan baik, benarsesuai dengan prinsip akuntansi juga dapat dipahami oleh pemakai informasi. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Defitri, 2018). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan

berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat satuan kerja perangkat daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dikategorikan sebagai sistem informasi, karena SIPKD merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

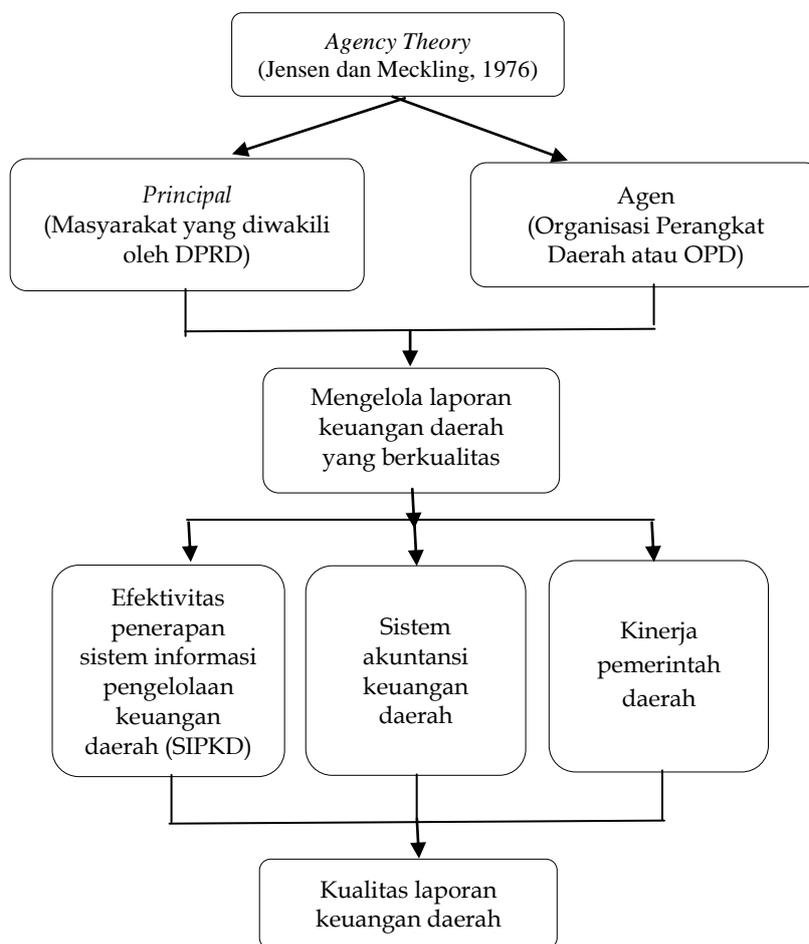
Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk membuat keputusan. Prosedur sistem akuntansi keuangan daerah menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 meliputi (1) pencatatan, (2) penggolongan, (3) pengikhtisaran dan (4) pelaporan.

Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Chabib dan Suropto (2011:3) kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dari suatu pemerintah daerah merupakan cerminan kualitas proses atau keberhasilan kegiatan/program yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk hasil berupa peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Rerangka Konseptual

Untuk menunjang kualitas laporan keuangan daerah memerlukan aspek lain yang dapat mempengaruhi antara lain efektivitas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), sistem akuntansi keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah. Berikut rerangka pemikiran seperti yang nampak pada Gambar 1 halaman 5.



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Penerapan sistem informasi pada pemerintahan mempunyai peran yang cukup penting untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas demi tercapainya akuntabilitas (Dewi dan Mimba, 2014). Upaya pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang baik yaitu dengan menerapkan sistem informasi yang dapat membantu pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Dewi dan Mimba (2014) menjelaskan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang dihadirkan oleh pemerintah sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektivitas implementasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Triyanto (2019) didalam penelitiannya membuktikan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

H₁:Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu dirancang suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu sub sistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup kebijakan sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia dan teknologi informasi. Suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Penelitian Silvia dan Wahyuni (2016) menjelaskan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.

H₂: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kinerja pemerintah daerah berupa hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2011: 67). Kinerja pemerintah daerah menentukan serta mencerminkan kualitas laporan keuangan daerah yang akurat. Azzindani *et al.*, (2019) membuktikan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas LKPD Lombok Tengah.

H₃: Kinerja Pemerintah Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kausal komparatif dimana penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat, serta dapat mengetahui sebab dan akibat antara dua variabel atau lebih. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survey. Menurut Sugiyono (2017:7) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat *positivisme*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Surabaya. Populasi penelitian berjumlah 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel berasal dari sumber yang berdasarkan pertimbangan tertentu yang ditentukan oleh penulis. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu agar dapat mendukung penelitian ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 90 responden dari 25 dinas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Surabaya. Kriteria sampel yang digunakan antara lain: (1) Kepala bagian keuangan, (2) Pegawai/staf yang berkedudukan sebagai pejabat pengelola keuangan pada masing-masing dinas pada OPD kota Surabaya, (3) Memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah kota Surabaya.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden) yang berisikan daftar pernyataan terstruktur yang ditujukan pada responden. Data subjek dengan demikian, merupakan data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden secara individual atau secara kelompok.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Menurut Sugiyono (2017:173), pengertian data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu hasil pengisian kuesioner dari responden yang berisikan pernyataan terkait Efektivitas penerapan SIPKD bersumber pada kuesioner (Riasena, 2014). Sistem akuntansi keuangan daerah bersumber pada kuesioner (Indriani, 2019). Kinerja Pemerintah Daerah bersumber pada kuesioner (Prabawati, 2019). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bersumber pada kuesioner (Indriani, 2019).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner kepada responden dengan mengajukan pernyataan-pernyataan terkait efektivitas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), sistem akuntansi keuangan daerah, kinerja pemerintah daerah dan kualitas laporan keuangan daerah. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2012:187). Pernyataan yang terdapat dalam kuesioner untuk masing-masing variabel diukur dengan menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2013:132). Pengisian kuesioner dilakukan secara langsung oleh responden yaitu kepala dinas bagian keuangan dan pegawai/staf bagian keuangan yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah kota Surabaya dengan memberi tanda *check list* (√) pada jawaban yang telah disediakan. Setiap kuesioner yang didistribusikan kepada responden disertai dengan surat permohonan izin riset penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Surabaya.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Efektivitas dapat diartikan sebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama (Livari, 2005). Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan menyangkut bagaimana melakukan pekerjaan yang benar. SIPKD merupakan salah satu peralatan yang dipakai untuk mencapai tujuan pekerjaan dalam pemerintah daerah, yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Untuk mengukur tingkat efektivitas penerapan SIPKD menggunakan enam indikator sebagai berikut: (1) Kemudahan untuk dipelajari, (2) Kemudahan mencapai tujuan, (3) Kecepatan dan ketepatan waktu, (4) Keamanan data, (5) Bebas dari Kesulitan, (6) Kemudahan penggunaan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Penerapan sistem akuntansi yang baik tentunya secara konsep dapat menghasilkan suatu laporan pemerintah daerah yang berkualitas dan meminimalkan kesalahan pencatatan, kecurangan, ketidakpatuhan terhadap hukum dan pada akhirnya diwujudkan dengan opini dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 variabel sistem akuntansi keuangan daerah diukur dengan menggunakan indikator yaitu: (1) Pencatatan, (2) Pengelolaan dan Pengikhtisar, (3) Pelaporan keuangan.

Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja dari suatu pemerintah daerah merupakan cerminan kualitas proses atau keberhasilan kegiatan/program yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk hasil berupa peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan suatu kinerja pemerintah daerah menghasilkan *output* berupa laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Sedarmayanti (2007), untuk mengukur kinerja pemerintah daerah melalui beberapa indikator sebagai berikut: (1) Sikap mental/perilaku, (2) Kemampuan, (3) Ketrampilan/*skill*, (4) Motivasi/semangat kerja.

Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kualitas laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami dan menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, bebas dari kesalahan material, dapat diandalkan, sehingga dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Indikator kualitas laporan keuangan diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Sudiarianti (2015) yaitu: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, (4) Dapat dipahami.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model persamaan-persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM) yang berbasis komponen atau varian. PLS digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten (*prediction*). PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* oleh karena tidak mengasumsikan data acak dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011). Penelitian ini memiliki model yang kompleks serta jumlah sampel yang terbatas, sehingga dalam analisis data menggunakan *software SmartPLS*. *SmartPLS* menggunakan metode *bootstrapping* atau penggandaan secara acak. Oleh karenanya asumsi normalitas tidak akan menjadi masalah. Selain itu, dengan dilakukannya *bootstrapping* maka *SmartPLS* tidak mensyaratkan jumlah minimum sampel, sehingga dapat diterapkan untuk penelitian dengan jumlah sampel kecil.

Model Pengukuran (Outer Model)

Model pengukuran menunjukkan bagaimana variabel manifest atau *observed variable* merepresentasi variabel laten untuk diukur (Ghozali dan Latan, 2015:7). Rangkaian uji dalam *outer model* adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dibagi menjadi dua bagian yaitu *Convergent Validity* (Validitas Konvergen) yang didalamnya terdapat dua kriteria untuk mengukur *outer model* yaitu *loading factor* dengan batas nilai yang digunakan $> 0,5$ secara umum dapat dikatakan signifikan, dan *Average Variance Extracted* (AVE) dengan kriteria penilaian adalah dapat dikatakan valid apabila memenuhi kriteria bahwa setiap indikator menghasilkan nilai $> 0,50$ (Wijaya, 2019:101). Selain *convergent validity*, terdapat *Discriminant Validity* (Validitas Diskriminan). Syarat untuk memenuhi validitas diskriminan ini adalah hasil dalam *indicators loading and cross-loadings* menunjukkan bahwa *loading* ke

konstruk lain (*cross-loading*) bernilai lebih rendah dari pada *loading* blok indikator ke konstruk variabel.

Berikut merupakan uji reliabilitas dalam mengukur *outer model*, untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan dengan cara menghitung nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha*. Suatu indikator dikatakan mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai *cronbach's alpha* > 0,60 untuk semua konstruk. Sehingga kriteria nilai dari penelitian ini dapat dikatakan reliabel yaitu indikator > 0,60. Menurut Ghozali (2006), suatu indikator dikatakan mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai *composite reliability* > 0,70 untuk semua konstruk. Sehingga kriteria nilai dari penelitian ini dapat dikatakan reliabel yaitu indikator > 0,70.

Model Struktural (*Inner Model*)

Inner model bertujuan untuk menguji hubungan dari indikator penyusun variabel (Wijaya, 2019:101). Rangkaian uji dalam model struktural atau *innermodel* adalah menghitung nilai *R-Square*. Perubahan dari nilai *R-Square* digunakan untuk mengevaluasi pengaruh dari variabel laten independen tertentu terhadap variabel dependen apakah memiliki pengaruh yang substantif (Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinasi (*R-square*) sebesar 0,67 mengindikasikan model "baik", nilai 0,33 model "moderat", dan nilai 0,19 model "lemah".

Pengujian hipotesis digunakan untuk menjelaskan arah dan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan cara menganalisis estimasi koefisien jalur. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *T-Statistics* dan nilai *P-Values*. Hipotesis penelitian dapat dinyatakan diterima apabila nilai *P-Values* < 0,05, jika *P-value* > 0,05 maka hipotesis alternatif tidak diterima.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah terutama dalam fungsi pelayanan publik. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya sebagai objek penelitian karena sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyampaikan informasi pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat. Data dalam penelitian ini berasal dari data primer berupa kuesioner yang ditujukan kepada pegawai bagian keuangan yang terdapat didalamnya adalah kepala bagian keuangan dan pegawai/staf bagian keuangan di sekretariat OPD kota Surabaya. Penelitian ini melibatkan 25 OPD Kota Surabaya.

Tabel 1
Pengumpulan Data

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Kuesioner Layak Diuji	90	90%
Kuesioner Tidak Kembali	4	4%
Kuesioner Cacat/Rusak	6	6%
Total	100	100%

Sumber: Data primer diolah, 2021

Jumlah kuesioner yang dikirimkan untuk setiap kantor OPD sebanyak 4 kuesioner sehingga total kuesioner yang dikirimkan sebanyak 100 kuesioner. Jumlah kuesioner yang dapat kembali sebanyak 96, namun kuesioner yang tidak dapat diolah sebanyak 6. Dengan demikian jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 90 kuesioner.

Analisis Statistik Deskriptif

Gambaran data dalam penelitian ini dapat dilihat dari minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Statistik deskriptif variabel-variabel penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah SIPKD, SAKD, KPD dan KLKD yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SIPKD	90	33	55	43.88	4.757
SAKD	90	33	55	46.81	4.896
KPD	90	33	55	46.07	4.747
KLKD	90	46	75	63.59	6.333

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 2 diatas, variabel Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) memiliki nilai minimum sebesar 33, nilai maximum sebesar 55 dan nilai mean sebesar 43,88. Sehingga dapat dikatakan penerapan aplikasi SIPKD di kantor OPD kota Surabaya telah meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi pengelolaan keuangan daerah dan telah diterapkan secara optimal. Sedangkan nilai dari standar deviasi variabel SIPKD sebesar 4,757.

Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai minimum sebesar 33, nilai maximum sebesar 55 dan nilai mean sebesar 46,81. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah di kantor OPD kota Surabaya sudah handal. Sedangkan nilai dari standar deviasi variabel SAKD sebesar 4,896.

Variabel Kinerja Pemerintah Daerah memiliki nilai minimum sebesar 33, nilai maximum sebesar 55 dan nilai mean sebesar 46,07. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintah daerah di OPD kota Surabaya berjalan dengan baik. Sedangkan nilai dari standar deviasi variabel KPD sebesar 4,747.

Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah memiliki nilai minimum sebesar 46, nilai maximum sebesar 75 dan nilai mean sebesar 63,59. Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki kualitas yang baik. Sedangkan nilai dari standar deviasi variabel KLKD sebesar 6,333.

Menilai Model Pengukuran (*Outer Model*)

Pengujian Validitas (*Convergent Validity*)

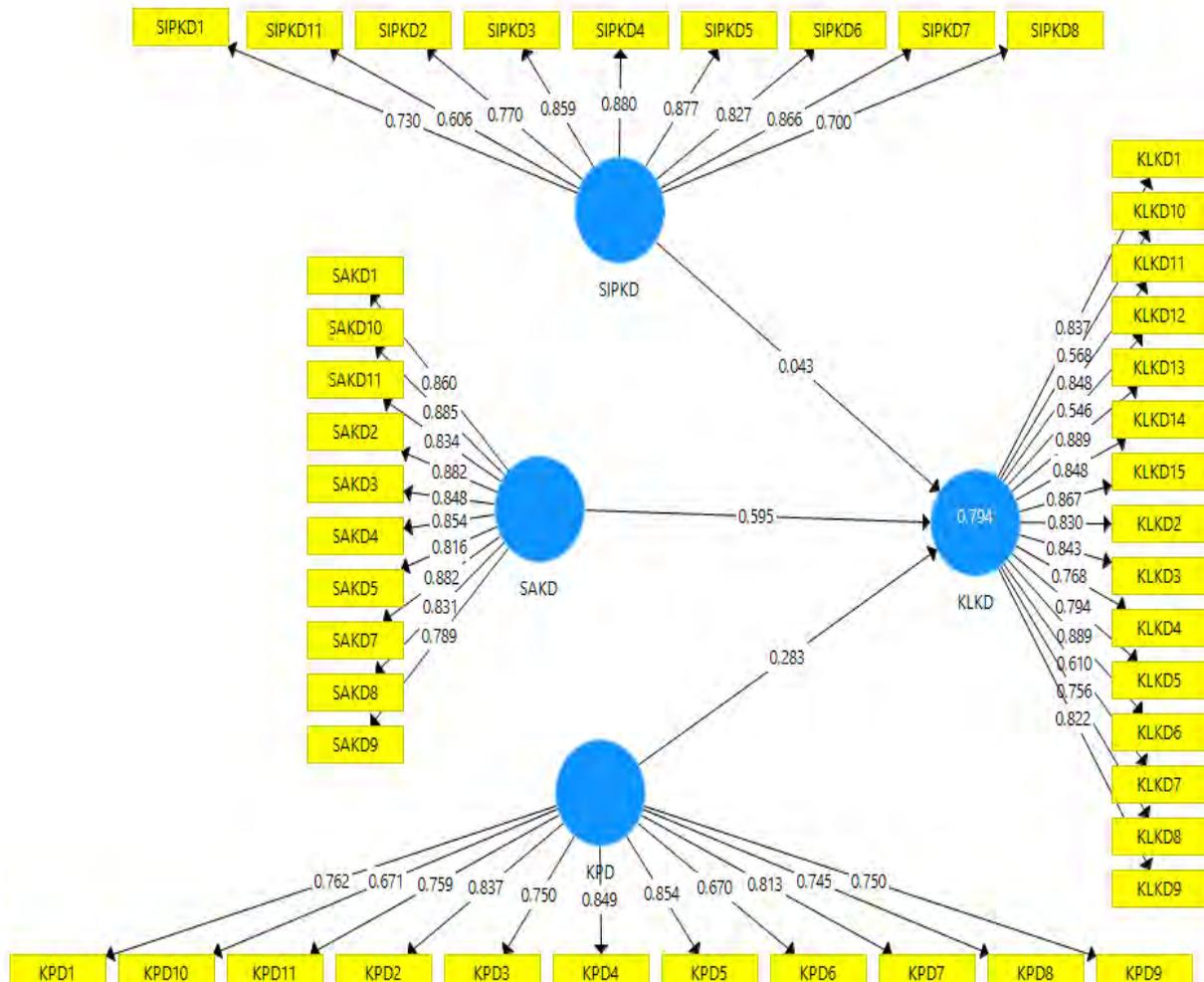
Pengujian validitas atau *convergent validity* menggunakan nilai *outer loading*. Berikut merupakan hasil pengujian validitas terhadap masing-masing variabel seperti yang terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil *Outer Loading* Setelah Dimodifikasi

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	KLKD1	0.837	Valid
	KLKD10	0.568	Valid
	KLKD11	0.848	Valid
	KLKD12	0.546	Valid
	KLKD13	0.889	Valid
	KLKD14	0.848	Valid
	KLKD15	0.867	Valid
	KLKD2	0.830	Valid
	KLKD3	0.843	Valid
	KLKD4	0.768	Valid
	KLKD5	0.794	Valid
	KLKD6	0.889	Valid
	KLKD7	0.610	Valid
	KLKD8	0.756	Valid
	KLKD9	0.822	Valid
Kinerja Pemerintah Daerah (X3)	KPD1	0.762	Valid
	KPD10	0.671	Valid
	KPD11	0.759	Valid
	KPD2	0.837	Valid
	KPD3	0.750	Valid
	KPD4	0.849	Valid
	KPD5	0.854	Valid
	KPD6	0.670	Valid
	KPD7	0.813	Valid
	KPD8	0.745	Valid
KPD9	0.750	Valid	
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	SAKD1	0.860	Valid
	SAKD10	0.885	Valid
	SAKD11	0.834	Valid
	SAKD2	0.882	Valid
	SAKD3	0.848	Valid
	SAKD4	0.854	Valid
	SAKD5	0.816	Valid
	SAKD7	0.882	Valid
	SAKD8	0.831	Valid
SAKD9	0.789	Valid	
Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)	SIPKD1	0.730	Valid
	SIPKD11	0.606	Valid
	SIPKD2	0.770	Valid
	SIPKD3	0.859	Valid
	SIPKD4	0.880	Valid
	SIPKD5	0.877	Valid
	SIPKD6	0.827	Valid
	SIPKD7	0.866	Valid
SIPKD8	0.700	Valid	

Sumber: Data primer diolah, 2021

Hasil pengolahan dengan menggunakan *SmartPLS* setelah dilakukan pengeluan indikator SAKD6 pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X2) dan indikator SIPKD10 dan SIPKD9 pada variabel efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X1). Dapat dilihat pada Tabel 3 nilai *outermodel* atau korelasi antara konstruk dengan variabel menunjukkan bahwa secara keseluruhan nilai *loading factor* $> 0,5$, sehingga konstruk untuk semua variabel sudah valid dari model. Berikut merupakan hasil *outermodel* setelah dimodifikasi:



Gambar 2
Model Outer Model Setelah Dimodifikasi
Sumber: Data primer diolah, 2021

Selain *loading factor*, *Average Variance Extracted* (AVE) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat validitas suatu indikator konstruk. Nilai AVE yang baik disyaratkan memiliki nilai $> 0,50$. Berikut merupakan hasil nilai AVE ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4
Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE
Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	0,622
Kinerja Pemerintah Daerah (X3)	0,595
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	0,720

Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)

0,633

Sumber: Data primer diolah, 2021

Nilai yang dilihat dalam pengujian ini adalah nilai *Average Variance Extracted (AVE)* pada secara keseluruhan semua variabel diperoleh sebagai hasil estimasi dimana nilainya > 0,50 sehingga dapat dinyatakan valid.

Pengujian Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Setelah dilakukan pengujian validitas menggunakan nilai *outer loading* dan AVE, selanjutnya dilakukan pengujian validitas diskriminan dengan cara melihat *cross loading*. Berikut merupakan hasil *cross loading* dapat ditunjukkan pada Tabel 5:

Tabel 5
Cross Loading

Indikator	KLKD	KPD	SAKD	SIPKD
KLKD1	0,837	0,690	0,732	0,515
KLKD10	0,568	0,420	0,456	0,329
KLKD11	0,848	0,810	0,785	0,639
KLKD12	0,546	0,491	0,484	0,359
KLKD13	0,889	0,809	0,840	0,688
KLKD14	0,848	0,768	0,782	0,686
KLKD15	0,867	0,777	0,843	0,669
KLKD2	0,830	0,654	0,666	0,648
KLKD3	0,843	0,675	0,691	0,578
KLKD4	0,768	0,597	0,642	0,554
KLKD5	0,794	0,633	0,654	0,549
KLKD6	0,889	0,729	0,733	0,611
KLKD7	0,610	0,387	0,448	0,339
KLKD8	0,756	0,684	0,731	0,575
KLKD9	0,822	0,667	0,739	0,616
KPD1	0,617	0,762	0,689	0,546
KPD10	0,538	0,671	0,553	0,460
KPD11	0,633	0,759	0,696	0,566
KPD2	0,752	0,837	0,878	0,674
KPD3	0,732	0,750	0,646	0,625
KPD4	0,685	0,849	0,733	0,552
KPD5	0,728	0,854	0,735	0,606
KPD6	0,467	0,670	0,616	0,524
KPD7	0,727	0,813	0,697	0,546
KPD8	0,554	0,745	0,607	0,611
KPD9	0,647	0,750	0,678	0,554
SAKD1	0,745	0,773	0,860	0,652
SAKD10	0,768	0,781	0,885	0,686
SAKD11	0,697	0,741	0,834	0,599
SAKD2	0,820	0,766	0,882	0,733
SAKD3	0,782	0,745	0,848	0,730
SAKD4	0,713	0,722	0,854	0,657
SAKD5	0,769	0,740	0,816	0,658

SAKD7	0,784	0,785	0,882	0,710
SAKD8	0,674	0,757	0,831	0,611
SAKD9	0,700	0,762	0,789	0,654
SIPKD1	0,444	0,477	0,567	0,730
SIPKD11	0,647	0,551	0,578	0,606
SIPKD2	0,428	0,516	0,563	0,770
SIPKD3	0,586	0,633	0,662	0,859
SIPKD4	0,569	0,635	0,728	0,880
SIPKD5	0,662	0,678	0,691	0,877
SIPKD6	0,551	0,564	0,591	0,827
SIPKD7	0,694	0,641	0,721	0,866
SIPKD8	0,450	0,523	0,471	0,700

Sumber: Data primer diolah, 2021

Dari hasil *cross loading* pada Tabel 5 diatas, dapat diketahui bahwa nilai *cross loading* masing-masing indikator setiap konstraknya yang dituju lebih tinggi daripada nilai korelasi dengan konstruk lainnya. Dengan demikian bahwa semua konstruk atau variabel laten sudah memiliki *discriminant validity* yang baik, dimana indikator pada blok indikator konstruk tersebut lebih baik daripada indikator di blok lainnya.

Pengujian Reliabilitas

Pengujian reliabilitas menggunakan nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Berikut merupakan hasil pengujian reliabilitas:

Tabel 6
Pengujian Reliabilitas

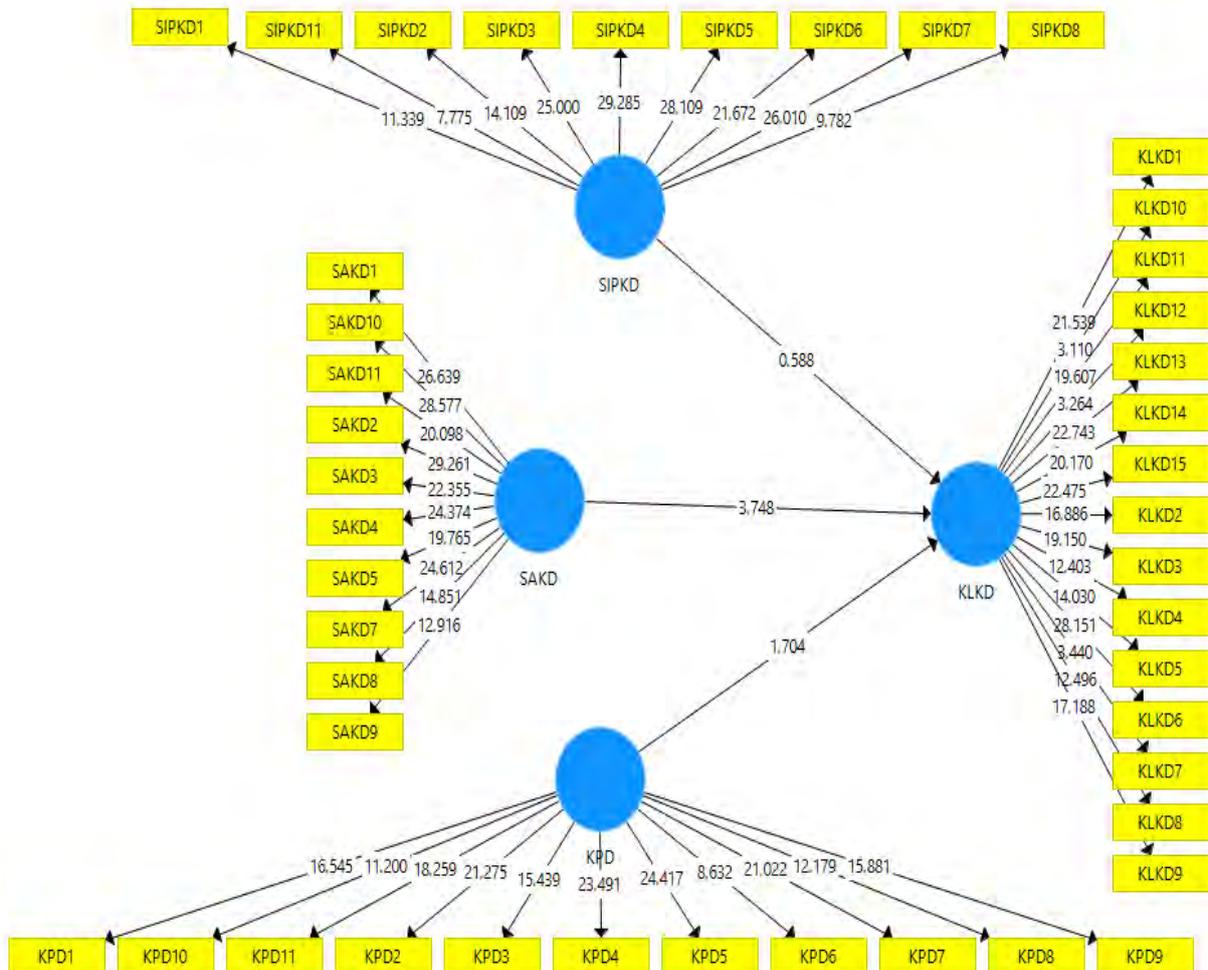
Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	<i>Rule of Thumb</i>	Evaluasi Model
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,955	0,960		Reliabel
Kinerja Pemerintah Daerah (X3)	0,931	0,941	>0,70	Reliabel
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	0,957	0,963		Reliabel
Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)	0,926	0,939		Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2021

Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Uji Struktural Model

Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Berikut merupakan hasil pengujian *inner model* seperti yang terlihat pada Gambar 3:



Gambar 3
Model Struktural (Inner Model)
 Sumber: Data primer diolah, 2021

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Tabel 7 merupakan hasil estimasi *R-square* dengan menggunakan *SmartPLS*.

Tabel 7
Nilai R-Square

Variabel	R ²
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,789

Sumber: Data primer diolah, 2021

Hasil nilai *R-Square* variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) yaitu 0,789 artinya variabel Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) dan Kinerja Pemerintah Daerah (X3) secara substansial dapat menjelaskan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dengan tingkat 78,9%.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *T-Statistics* dan nilai *P-Values*. Hipotesis penelitian dapat dinyatakan diterima apabila nilai *P-Values* < 0,05. Seperti yang terlihat pada Tabel 8 berikut:

Tabel 8
Path Coefficient

Hipotesis	Pengaruh	Original Samples	T-Statistics	P-Values	Hasil
H ₁	SIPKD -> KLKD	0,043	0,588	0,557	Ditolak
H ₂	SAKD -> KLKD	0,595	3,748	0,000	Diterima
H ₃	KPD -> KLKD	0,283	1,704	0,089	Ditolak

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 8 diatas menunjukkan hasil uji hipotesis dengan perumusan sebagai berikut: (a) Efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai *t-statistic* sebesar 0,588 dengan nilai *p-value* sebesar 0,557 yang dimana lebih besar dari nilai 0,05 dan hipotesis pertama (H₁) ditolak, (b) Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai *t-statistic* sebesar 3,748 dengan *p-value* sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05 dan hipotesis kedua (H₂) diterima, (c) Kinerja pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai *t-statistic* sebesar 1,704 dengan nilai *p-value* sebesar 0,089 yang dimana lebih besar dari nilai 0,05 dan hipotesis ketiga (H₃) ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat diketahui bahwa efektivitas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dijelaskan dari hasil penelitian ini ditunjukkan oleh jawaban responden melalui kuesioner, yang mana dapat disimpulkan bahwa penerapan SIPKD pada Organisasi Perangkat Daerah kota Surabaya belum sepenuhnya diterapkan secara optimal disebabkan karena kesulitan untuk dipelajari dan peralatan serta jaringan yang digunakan masih sering mengalami kendala. Sehingga untuk mengoperasikan SIPKD belum berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Isnaen dan Albastiah (2021), yang menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal disebabkan oleh peralatan dan jaringan yang digunakan masih sering mengalami kendala sehingga untuk menciptakan laporan keuangan daerah yang berkualitas belum terlaksana dengan baik. Untuk mengatasi kesulitan tersebut pemerintah daerah terus mendorong dan melakukan pelatihan dalam mengaplikasikan SIPKD dengan baik serta memfasilitasi dan melakukan perbaikan peralatan dan jaringan yang memadai (Isnaen dan Albastiah, 2021).

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat diketahui bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dipengaruhi oleh jawaban responden melalui kuesioner, yang mana dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka akan semakin menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Dilihat dari penerapan sistem

akuntansi keuangan daerah yang dilaksanakan dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pegawai/staf keuangan di Organisasi Perangkat Daerah kota Surabaya, cenderung akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kapriana dan Agung (2020) dan Pujanira dan Taman (2017) yang membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini didukung oleh teori Mardiasmo (2004) yang menyatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang andal.

Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat diketahui bahwa kinerja pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dapat dijelaskan dari jawaban responden melalui kuesioner, yang mana dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak berperan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Disebabkan karena peraturan yang tumpang tindih sehingga seringkali terjadi aturan yang belum sempat dipahami dan diterapkan dengan baik, sudah muncul aturan baru yang membuat pemerintah kebingungan, serta keterbatasan kinerja pemerintah daerah yang kurang menguasai bidang akuntansi dan tidak memahami akuntansi secara baik, sehingga untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas masih belum berjalan dengan baik. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kapriana dan Agung (2020) dan Isnaen dan Albastiah (2021) yang membuktikan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian Isnaen dan Albastiah (2021) menjelaskan bahwa kurangnya kompetensi sumber daya manusia disebabkan oleh penempatan posisi dan kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan keahlian dan kompetensi sebagai tenaga akuntansi atau penata usaha keuangan yang tidak pada bidangnya. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para pengelola keuangan daerah, pemerintah daerah harus terus mengupayakan agar terciptanya peraturan yang jelas serta mendorong para pengelola laporan keuangan daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang akuntansi dan terus mendapatkan pelatihan khusus dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat terus meningkat agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Pradono, 2015).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap hasil koesioner yang dibagikan kepada satuan kerja perangkat daerah kota Surabaya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa OPD kota Surabaya belum menerapkan sistem informasi keuangan pemerintah daerah dengan baik. Pengoperasian aplikasi SIPKD yang sering mengalami kesulitan dan peralatan serta jaringan yang sering mengalami kendala. Sehingga untuk mengaplikasikan SIPKD belum berdasarkan asas yang ditentukan, (2) Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka akan semakin menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dilihat dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang dikelola oleh pegawai/staf di OPD kota Surabaya disusun secara sistematis mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, (3) Kinerja pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dapat menunjukkan

bahwa kinerja pemerintah daerah belum cukup baik dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penetapan peraturan yang belum jelas dan kurang menguasai bidang akuntansi yang menyebabkan kinerja pemerintah daerah belum optimal dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: (1) Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yaitu efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD), sistem akuntansi keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, (2) Adanya kendala teknis saat pemberian kuesioner secara langsung ke responden untuk mencegah penyebaran virus karena adanya pandemi covid-19, maka dilakukan sesuai protokol kesehatan.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka ada beberapa saran yang bisa disampaikan antara lain: (1) Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Surabaya, disarankan untuk menetapkan aturan yang jelas dan mengatasi kurangnya pegawai/staf yang berlatar belakang akuntansi di OPD kota Surabaya. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mengadakan pendidikan/pelatihan dalam bidang akuntansi bagi pegawai/staf yang terlibat langsung dalam penyusunan LKPD untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah di OPD kota Surabaya. Serta memfasilitasi peralatan dan kestabilan jaringan untuk memenuhi kebutuhan OPD atas teknologi informasi sebagai akses Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), (2) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengambil sampel lebih banyak, yaitu memperluas objek penelitian dengan ruang lingkup provinsi dan organisasi perangkat daerah lainnya seperti kecamatan dan kelurahan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan generalisasi untuk memperlihatkan laporan keuangan daerah yang berkualitas, (3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah variabel independen lainnya seperti penerapan sistem pengendalian internal dan sistem informasi manajemen daerah dalam menilai kualitas laporan keuangan daerah, (4) Peneliti menyarankan jika penyebaran kuesioner masih dalam situasi saat pandemi covid-19, maka dapat dilakukan melalui fasilitas google form, email dan whatsapp.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, D. K. dan Y. Suhardjo. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal STIE Semarang* 5(3): 94-95.
- Azzindani, R., E. Pituringsih, dan M. Irwan. 2019. Pengaruh Implementasi SIMDA, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan SAP Terhadap Kualitas LKPD Lombok Tengah. *E-Jurnal Akuntansi Univeritas Udayana* 27(1): 440-441.
- BPK RI. 2019. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS I dan II Tahun 2019). *www.bpk.go.id*. 27 Oktober 2020 (19:04).
- Chabib, S. dan Suripto. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Fokus Media. Bandung.
- Defitri, S. Y. 2018. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita* 3(1): 68-70.
- Dewi, P. A. R. dan Mimba, N. P. S. H. 2014. Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8(3): 442-446.
- Ghozali. I. 2006. *Sructural Equation Modeling Dengan Partial Least Square*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- . 2011. *Sructural Equation Modeling Dengan Partial Least Square (PLS) Edisi 3*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- . dan H. Latan. 2015. *Partial Least Square Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Indriani, M. R. 2019. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(1): 3-14.
- Isnaen, F. dan F. A. Albastiah. 2021. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Wilayah Jakarta Barat). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 2(1): 49-72.
- Jensen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3(1): 305-360.
- Kapriana, A. P. dan I. Agung. 2020. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada OPD Dikabupaten Kuburaya). *Jurnal Audit dan Akuntansi* 9(1).
- Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Legalitas. Jakarta.
- Livari, J. 2005. An Empirical Test of the DeLone and McLean Model of Information System Success. *Database for advances in Information Systems* 36(2): 8-27.
- Mangkunegara. 2011. *Manajemen Sumber Daya Perusahaan*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah.
- Prabawati, U. S. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Magelang.
- Pradono, F. C. 2015. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor-faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 22(2): 194-196.
- Pujanira, P. dan A. Taman. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 6(2): 25-27.
- Riasena. R. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Sistem Informasi dan Penggunaan Sistem Informasi (Studi Pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang). *Skripsi*. Universitas Soegijapranata. Semarang.
- Silvia, S. dan S. Wahyuni. 2018. Persepsi yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan (JAKTABANGUN) STIE Lhokseumawe*, 4(1): 99-100.
- Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Refika Aditama. Bandung.
- Sudiarianti, N. M. 2015. Pengaruh Kompetensi SDM pada Pemerintah serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Tesis*. Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. Universitas Undayana. Denpasar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- . 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- . 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

- Triyanto. 2019. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dengan Pemoderasi Komitmen Organisasi (Studi Pad Badan Pusat Statistik Se-Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa* 4(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Wijaya, A. 2019. *Metode Penelitian Menggunakan Smart PLS* 03. Innosain. Yogyakarta.